

**PERANAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DALAM PEMBANGUNAN HUTAN
KEMASYARAKATAN DI PERBUKITAN MENOREH
(KASUS DI DESA HARGOREJO, KOKAP, KULON PROGO, D.I. YOGYAKARTA)**

MARIA PALMOLINA

Balai Penelitian Teknologi Agroforestry Ciamis
Jl. Raya Ciamis-Banjar Km 4, Ciamis 46201
E-mail: rapraput@yahoo.co.id

ABSTRACT

Development of Non-Timber Forest Products (NTFPs) in various forestry development program that promotes the function of environmental, social, economic, and culture of local communities is expected to create sustainability. One of the forestry development programs are Community Forest (HKm). This study aimed to determine the role of NTFPs in community forest development which was done in Menoreh Hills in Hargorejo's Village, Kokap, Kulon Progo's Regency. Data were collected in January until June 2013 with in-depth interviews to 10 informers and by questioners to 35 members of the group of farmers who had arable land in HKm. The dominant type of timber plants were teak, mahogany, and acacia. Further, the NTFPs plants grown were fruit crops (banana, jackfruit), food crops (cassava, corn, soybeans, peanuts), and herbs (ginger, turmeric, temulawak). The management of HKm was conducted independently by DAMAR foundation. In addition to the condition of being green and cool environment (66% of respondents said the village environment becomes greener and cooler), increased water discharge (76% of respondents expressed a lot of water supplies), the positive impact of community forest management in Hargorejo's Village was also the contribution to the household economy of farmers (a reduction in the percentage of less well economic conditions of farmers from 80% to 52% after the access HKm).

Keywords: NTFPs, community forest, Menoreh, development program, forest benefit

INTISARI

Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dalam berbagai program pembangunan kehutanan yang mengutamakan fungsi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal diharapkan dapat mewujudkan kelestarian hutan. Salah satu program pembangunan kehutanan adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm). Kajian ini bertujuan untuk mengetahui peranan HHBK dalam pembangunan HKm yang dilakukan di Perbukitan Menoreh dengan kasus di Desa Hargorejo, Kokap, Kulon Progo. Data dikumpulkan pada bulan Januari hingga Juni 2013 melalui wawancara secara mendalam terhadap 10 informan dan penyebaran kuesioner terhadap 35 orang anggota kelompok tani yang memiliki lahan garapan di HKm. Jenis tanaman kayu yang dominan dikembangkan adalah tanaman jati, mahoni, dan akasia. Sementara tanaman HHBK yang ditanam adalah tanaman buah (pisang, nangka), tanaman pangan (singkong, jagung, kedelai, kacang tanah), serta tanaman herbal (jahe, kunyit, temulawak). Pengelolaan HKm dilakukan secara swadaya dengan didampingi Yayasan DAMAR. Selain kondisi lingkungan menjadi hijau dan sejuk (66% responden menyatakan lingkungan desa menjadi lebih hijau dan sejuk), debit air bertambah (76% responden menyatakan persediaan air banyak), dampak positif pengelolaan HKm di Desa Hargorejo adalah juga memberikan kontribusi ekonomi pada rumah tangga petani (terjadi pengurangan prosentasi kondisi ekonomi petani kurang baik dari 80% menjadi 52% setelah adanya akses HKm).

Kata kunci: HHBK, hutan kemasyarakatan, Menoreh, program pengembangan, manfaat hutan.

PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir keberadaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dipandang penting untuk terus dikembangkan mengingat produktivitas kayu dari hutan alam semakin menurun. Perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan kini cenderung kepada pengelolaan kawasan (ekosistem) hutan secara utuh dan menuntut diversifikasi hasil hutan selain kayu. HHBK berasal dari bagian pohon atau tumbuh-tumbuhan yang memiliki sifat khusus yang dapat menjadi suatu barang yang diperlukan oleh masyarakat, dijual sebagai komoditi ekspor atau sebagai bahan baku untuk suatu industri. FAO mendefinisikan HHBK sebagai produk selain kayu yang berasal dari bahan biologis, diperoleh dari hutan dan pepohonan yang tumbuh di sekitar hutan. Menurut UU Kehutanan Nomor 41 tahun 1999, disebutkan bahwa HHBK adalah hasil hutan hayati maupun non hayati. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan No. 35 tahun 2007, HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidayanya kecuali kayu yang berasal dari hutan. Beragam manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat diperoleh dari keberadaan HHBK ini. Pada tahun 2006 terdapat kurang lebih 558 komoditas HHBK yang menjadi urusan Departemen Kehutanan (Departemen Kehutanan, 2007).

Pengembangan HHBK pun tak luput dilakukan dalam pembangunan hutan kemasyarakatan (HKm). HKm dirumuskan berdasarkan Kepmenhutbun No. 677/Kpts-II/1998 sebagai hutan negara yang dicadangkan atau ditetapkan oleh menteri untuk dikelola oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan, dengan tujuan pemanfaatan hutan secara lestari sesuai dengan fungsinya dan menitikberatkan pada kepentingan menyejahterakan masyarakat. Melihat dari definisi HKm ini menunjukkan bahwa HKm mempertemukan semua

kepentingan, yaitu kesejahteraan masyarakat, produktivitas sumberdaya hutan dan kelestarian fungsi hutan. HKm dapat lebih luas menjabarkan pola-pola manajemen lahan hutan yang mampu secara efektif melibatkan masyarakat secara langsung dalam sistem pengelolaan hutan, memberikan kontribusi secara nyata bagi kesejahteraan masyarakat, secara teknis mampu meningkatkan produktivitas sumberdaya hutan dan secara ekologis mampu menjamin kelestarian fungsi hutan. Pada banyak penelitian, dari aspek ekologis maupun produktivitas lahan membuktikan bahwa persaingan antara tanaman hutan/perkebunan dengan tanaman palawija lebih menguntungkan dibandingkan dengan persaingan dengan alang-alang. Sepanjang penanaman tanaman pangan di lahan hutan dan kebun untuk produksi pangan harus tidak mengganggu fungsi hutan sehingga sesuai dengan salah satu kesepakatan Quebec 1997 yaitu pemanfaatan sumberdaya alam (hutan) yang menjamin kelestarian lingkungan hidup termasuk air.

Perbukitan Menoreh adalah salah satu daerah resapan air di bagian utara dan barat wilayah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian dari gugusan perbukitan yang terentang mulai dari Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan berujung di bagian selatan wilayah Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Luas keseluruhan Perbukitan Menoreh adalah 48.735 m² (Darmanto, 2004 dalam Budi, 2012) dengan daerah resapan air meliputi daerah tangkapan sungai Progo (Progo Teras, Samigaluh, Pekik Jamal, dan Sudu). Sebagai daerah resapan air (*catchment area*), Perbukitan Menoreh perlu mendapat tindakan konservasi tanah untuk menjaga kelangsungan fungsi hidrologis di dalamnya. Salah satu pembangunan kehutanan yang dikembangkan di Perbukitan Menoreh adalah Hutan

Kemasyarakatan (HKm) dimana pola penanamannya adalah dengan penanaman kayu dan tanaman HHBK (agroforestri).

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui peranan HHBK dalam pembangunan HKm yang dilakukan di Perbukitan Menoreh dengan kasus di Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Hasil kajian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu gambaran pengelolaan wilayah untuk mendukung daerah resapan air.

BAHAN DAN METODE

Deskripsi Lokasi Kajian

Desa Hargorejo terletak di Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta yang di sebelah utara berbatasan dengan Desa Hargowilis Kecamatan Kokap, sebelah barat berbatasan dengan Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tawang Sari Kecamatan Pengasih, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Karang Sari Kecamatan Pengasih (Desa Hargorejo, 2010). Desa Hargorejo seluas 1.543,45 ha yang terdiri dari 16 pedukuhan, 37 Rukun Warga (RW), dan 126 Rukun Tetangga (RT). Desa Hargorejo terletak pada ketinggian 0-500 m dpl yang terbagi menjadi 3 wilayah yaitu: 1) bagian utara merupakan dataran tinggi Perbukitan Menoreh dengan ketinggian 251-500 m dpl yang rawan longsor sehingga digunakan untuk kawasan budidaya konservasi, 2) bagian tengah merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian 76-250 m dpl, kemiringan 2-15°, peralihan dataran rendah dan perbukitan yang berombak dan bergelombang, 3) bagian selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-75 m dpl.

Penduduk Desa Hargorejo sebanyak 10.446 orang yang terdiri dari 5.168 orang laki-laki dan

5.278 orang perempuan yang berasal dari 2.708 KK yang didominasi keluarga miskin sebanyak 1.049 KK atau 38,74% (Desa Hargorejo, 2010). Sebagian besar masyarakat Desa Hargorejo (55%) bermata pencaharian sebagai petani hutan rakyat dengan penggunaan lahan untuk hutan rakyat seluas 390 ha dan hutan negara seluas 245,86 ha (BPS, 2010).

Metode dan Waktu Kajian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi kasus di Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Studi kasus yaitu suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 1984a: 1981b dalam Yin, 2008). Kajian dilaksanakan pada bulan Januari hingga Juni 2013.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Unit analisis kajian ini adalah anggota kelompok tani di lokasi kajian yang memiliki lahan garapan di HKm (Kelompok Tani "Taruna Tani"). Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik penyebaran kuesioner terhadap 35 orang responden dan wawancara mendalam terhadap 10 orang narasumber kunci yang merupakan ketua kelompok tani, kepala dusun, ketua LSM Damar, penyuluh kehutanan wilayah Kecamatan Kokap, dan Kepala Desa Hargorejo. Selain itu, juga dilakukan observasi tentang pengelolaan lahan di lokasi kajian. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui teknik dokumentasi yang diperoleh dari monografi desa, kecamatan dalam angka, serta data pendukung lainnya. Hasil pengumpulan data selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif yang berupa uraian dan disajikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Petani HKm di Desa Hargorejo

Profil petani HKm di Desa Hargorejo digambarkan melalui profil responden pada Tabel 1. Tabel 1 menunjukkan bahwa petani HKm di Desa Hargorejo didominasi oleh responden laki-laki, berusia lanjut (74% berusia lebih dari 50 tahun), berpendidikan SD/ sederajat (60%), dengan lama berusaha tani lebih dari 30 tahun (35%), dan jumlah tanggungan keluarga antara 3-6 orang (74%). Petani HKm mayoritas berusia lanjut karena sumber daya manusia (SDM) yang berusia muda lebih berminat bekerja di sektor non agraris. Pengelolaan HKm oleh responden didukung oleh kepemilikan lahan milik dan lahan garapan yang mayoritas tergolong sempit, kurang dari 0,25 ha. Masyarakat Desa Hargorejo memperoleh izin pengelolaan HKm secara *de facto* pada tahun 2007 dari Kementerian Kehutanan berdasarkan SK. 437/Menhut-II/2007 tertanggal 10 Desember 2007 serta SK. IUPHKM 448-449/Tahun 2007 tanggal 12 Desember 2008 seluas 43,40 hektar dengan harapan masyarakat lebih merasa memiliki hutan dengan ikut menjaga dan mengelolanya.

Pengelolaan HKm di Desa Hargorejo

Luas hutan negara di Perbukitan Menoreh adalah 1.045 ha, yang terbagi dalam 2 RPH yaitu RPH Sermo dan RPH Kokap, terdiri dari 30 petak dan dua fungsi hutan yaitu hutan produksi dan hutan lindung. Setidaknya ada 6 desa yang berbatasan langsung dan secara administratif mempunyai wilayah hutan negara, di antaranya Desa Hargorejo yang berbatasan dengan hutan negara yang berfungsi sebagai hutan produksi (Tabel 2). Pemberian izin HKm pada masyarakat Desa Hargorejo berawal dari kondisi hutan negara yang kering/tandus pada tahun 1980 hingga 1990-an yang mengakibatkan masyarakat Desa Hargorejo mengalami masa paceklik yang

berkepanjangan. Mereka sering mengalami kekurangan air dan udara terasa panas sekali, sehingga mendorong beberapa anggota masyarakat desa melakukan inisiatif memanfaatkan lahan hutan yang gundul dengan melakukan penanaman tanaman hutan, buah-buahan, dan palawija.

Pada tahun 1999, masyarakat desa dibantu oleh Yayasan Damar, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) membentuk suatu kelembagaan berupa kelompok Tani Hutan (Tabel 2), hingga akhirnya pada tahun 2007 hutan negara tersebut diputuskan sebagai HKm. Masyarakat yang telah berinisiatif menghijaukan hutan diberi izin HKm serta mendapatkan bagi hasil dari pemanenan kayunya.

Salah satu program yang dibawa oleh Yayasan DAMAR adalah pengembangan tanaman herbal sebagai tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di bawah tegakan tanaman kayu dengan sedikit intervensi petani. Tanaman herbal yang dominan ditanam oleh petani yaitu jahe, kunyit, dan temulawak, sedangkan tanaman pangan yang dominan ditanam yaitu jagung, ubi, kacang tanah, kacang kedelai. Hasil panen dari tanaman herbal dan pangan tersebut selain dikonsumsi sendiri, sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan akan uang tunai guna membeli kebutuhan pangan/pokok seperti beras, minyak goreng, dan kebutuhan dapur lainnya. Gambaran singkat HHBK hayati di HKm Desa Hargorejo tertera pada Tabel 3.

Peranan HHBK

Turunnya izin pengelolaan HKm membuat masyarakat lebih merasa memiliki hutan dengan menjaga dan mengelolanya. Dengan bermodalkan nilai-nilai kebersamaan, semangat, dan kesamaan nasib sebagai pihak pertama yang merasakan akibat-akibat kerusakan hutan, mereka dengan senang hati bekerja mengolah dan mengelola lahan HKm.

Tabel 1. Profil Responden di Desa Hargorejo, Kokap, Kulon Progo

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Usia (tahun)		
	a. < 30	0	0
	b. 30-50	9	26
	c. > 50	26	74
2.	Tingkat pendidikan		
	a. SD/ sederajat	21	60
	b. SLTP/ sederajat	7	20
	c. SLTA /sederajat	6	17
	d. Perguruan tinggi	1	3
3.	Pekerjaan utama		
	a. Petani	15	43
	b. Buruh tani	4	11
	c. Penyadap nira	4	11
	d. Non pertanian (tukang kayu, pengrajin batu bata, sopir, pns)	12	35
4.	Pekerjaan sampingan		
	a. Petani	17	49
	b. Buruh tani	5	14
	c. Peternak	6	17
	e. Non pertanian (buruh serabutan, penjahit)	3	9
	f. Tidak punya	4	11
5.	Lama berusaha tani (tahun)		
	a. <10	7	20
	b. 10-20	5	14
	c. 20-30	11	31
	d. >30	12	35
6.	Luas lahan milik (ha)		
	a. < 0,250	22	63
	b. 0,251-0,500	9	26
	c. 0,510-0,750	3	8
	d. 0,751-1,000	1	3
7.	Luas lahan garapan (ha)		
	a. < 0,250	28	80
	b. 0,251-0,500	6	17
	c. 0,510-0,750	1	3
	d. 0,751-1,000	0	0
8.	Jumlah tanggungan keluarga (orang)		
	a. <3	9	26
	b. 3-6	26	74
	c. >6	0	0

Sumber: data primer, diolah 2014

Kenyataan di lapangan, masyarakat Desa Hargorejo memprioritaskan tanaman semusim dan MPTS pada arealnya dengan tetap menjaga tanaman kayu yang telah ada sebelum mereka masuk hutan dan bahkan banyak juga yang menanam beberapa jenis tanaman kayu di lahan negara tersebut seperti: sengon, mahoni, akasia, dengan harapan mereka akan mendapatkan bagi hasil. Sesuai dengan fungsinya, HKm di Desa Hargorejo adalah hutan produksi

dimana masyarakat tidak hanya mendapatkan kewenangan mengolah lahan dengan tanaman semusim tetapi juga diijinkan melakukan penanaman tanaman keras/kayu.

Saat ini beberapa jenis tanaman HHBK (Tabel 3) yang dibudidayakan di lahan HKm lebih banyak berupa tanaman pangan. Namun kontribusi kehutanan dalam mendukung ketahanan pangan tersebut belum diakui oleh banyak pihak karena

Tabel 2. Kelompok Tani Hutan di Desa Hargorejo, Hargowilis dan Sendangsari, Kokap

No.	KTH	Alamat	Jumlah Anggota	Wilayah Pengelolaan & Fungsi Hutan
1.	Taruna Tani	Selo Timur, Hargorejo, Kokap	163	Petak 17 (43,4 ha); Hutan Produksi
2.	Nuju Makmur	Pandu, Hargorejo, Kokap	114	Petak 19 (39,6 Ha); Hutan Produksi
3.	Mandiri	Kalibiru, Hargowilis, Kokap	106	Petak 28 & 29 (29 Ha); Hutan Lindung
4.	Suko Makmur	Girinyono, Sendangsari, Pengasih	41	Petak 29 (15 Ha); Hutan Lindung
5.	Rukun Makaryo	Girinyono, Sendangsari, Kokap	115	Petak 29 & 30 (36 Ha); Hutan Lindung
6.	Menggerejo	Dusun Soka, Hargowilis, Kokap	45	Petak 28 (11,2 Ha); Hutan Lindung
7.	Sido Akur	Dusun Clapar, Hargowilis, Kokap	65	Petak 29 (20 Ha); Hutan Lindung

Sumber: Data primer 2013

Tabel 3. Profil Singkat HHBK Hayati di HKm Desa Hargorejo

Kelompok Komoditas	Potensi Sumberdaya	Potensi Ekonomi	Pengungkit	Kendala	Ancaman	Intervensi Yang Diperlukan
Tanaman Obat: 1. Kayu Putih 2. Empon-empon (jahe, temulawak, kunyit)	Daun, Umbi	Pasar domestik dan internasional biofarmaka terbuka sangat lebar	Melibatkan perempuan dalam kegiatan pasca panen Mudah dibudidayakan	Kualitas hasil panen rendah, Pengetahuan petani dan pelaku usaha terhadap keinginan dan kebutuhan pasar masih rendah.	Pasar menginginkan kualitas hasil yang bermutu tinggi dan siap diolah/dipakai.	Pasar global Pasar dan ekonomi nasional Pasar dan ekonomi lokal Kapasitas pengelolaan
Tanaman Buah-buahan: 1. Pisang 2. Kelapa 3. Nangka 4. Kopi	Buah, Daun Nira, Biji	Pasar domestik terbuka sangat lebar	Melibatkan perempuan dalam kegiatan pasca panen Mudah dibudidayakan	Pengembangan pasar Industri hilir belum dikembangkan		usaha/produksi Pelayanan pasar Informasi dan pembelajaran Pengembangan teknologi
Tanaman Pangan: 1. Padi 2. Ubi kayu 3. Ubi jalar 4. Jagung 5. Kacang Tanah 6. Kacang Kedelai	Biji, Umbi, Buah	Selain untuk dipasarkan juga sebagai kebutuhan pangan rumah tangga petani (sebagai ketahanan pangan)	Melibatkan perempuan dalam setiap kegiatan usaha Mudah dibudidayakan Menyerap banyak tenaga kerja	Pengembangan pasar Industri hilir belum dikembangkan (lebih kepada konsumsi sendiri)		Kebijakan kehutanan

Sumber: Data Primer, diolah 2014

pangan dari hutan belum diperhitungkan sebagai hasil hutan. Sementara banyak proposisi yang terbentuk terhadap HHBK memunculkan argumen bahwa pendapatan potensial dari pemanenan HHBK lestari dapat lebih tinggi dibanding pendapatan dari pemanenan kayu, selain pendapatan dari penggunaan pertanian atau perkebunan dalam kesatuan wilayah hutan. Beberapa proposisi tersebut adalah: (1) HHBK jauh lebih banyak dibanding kayu sehingga memberi kontribusi penting bagi penghidupan dan kesejahteraan masyarakat yang hidup di dekat dan dalam hutan, di antaranya: memberi mereka makanan, obat-obatan, input material lain dan sumber kerja, dan pendapatan, khususnya pada masa sulit, (2) Eksploitasi HHBK secara ekologis kurang destruktif dibanding pemanenan kayu dan memberi dasar yang lebih baik untuk pengelolaan hutan lestari, (3) Peningkatan panen HHBK komersial menambah nilai yang dipersepsikan mengenai hutan tropis, pada level lokal dan nasional, dengan meningkatkan insentif untuk mempertahankan sumber daya hutan, bukannya konversi lahan untuk pertanian atau peternakan (Arnold dan Peres, 1999). Selain itu beragam jenis tanaman pertanian belum tercantum dalam Permenhut P.35/2007 seperti : padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, kopi, dan lainnya yang telah lama diusahakan melalui hutan tanaman agroforestri. Sebagaimana yang diterapkan oleh masyarakat petani di Desa Hargorejo, mereka menggunakan sistem agroforestri dalam mengelola lahannya.

Peranan HHBK dapat digolongkan dalam 3 aspek yakni aspek ekologis, aspek ekonomis, dan aspek pembangunan wilayah (Sudarmalik *et al.*, 2006), sebagai berikut :

1. Peranan HHBK terhadap aspek ekologis

Dalam ekosistem hutan, HHBK merupakan bagian dari ekosistem hutan. Berdasarkan sejarah

interaksi manusia dengan hutan: semenjak awal kehidupan manusia hutan menjadi sumber pangan utama. Selanjutnya hutan menjadi tempat awal berkembangnya budidaya tanaman pangan, dimana mulanya pada saat permudaan hutan. Kini beragam jenis tanaman pangan baik berupa pohon maupun tanaman semusim dibudidayakan pada semua jenis hutan tanamam (Puspitojati *et al.*, 2013). Demikian pula pada HKm di Desa Hargorejo, kini marak berbagai tanaman semusim (Tabel 3) untuk kebutuhan ketahanan pangan mereka, dimana lahan milik garapan mereka semakin sempit seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk.

2. Peranan HHBK terhadap ekonomi rumah tangga

HHBK dapat menjaga adanya kestabilan pendapatan dan resiliensi (kekenyalan) terhadap perubahan yang terjadi. Resiliensi adalah suatu tingkat kelenturan dari sumber pendapatan terhadap adanya perubahan pasar. Contohnya adanya perubahan nilai tukar mata uang. Pada saat terjadi krisis moneter, HHBK memiliki peran yang besar terhadap pendapatan rumah tangga dan devisa negara karena HHBK tidak menggunakan komponen impor dalam memproduksi hasil. Demikian halnya dengan masyarakat petani di Desa Hargorejo, ketika terjadi krisis moneter, mereka tidak mengalami krisis sebagaimana yang terjadi saat itu bahkan mereka membuat suatu gebrakan dengan menanami hutan negara yang gundul dengan berbagai tanaman keras/kayu dan tanaman HHBK. Dampaknya, selain lingkungan menjadi lebih hijau, debit air bertambah, juga perekonomian masyarakatnya tetap terjamin (Tabel 4, 5, 6), bahkan terjadi pengurangan prosentasi kondisi ekonomi petani kurang baik dari 80% menjadi 52%.

3. Peranan HHBK terhadap pembangunan wilayah

Dengan pengaturan terhadap HHBK baik dari proses produksi, pengolahan dan pemasaran, semua

dapat dilakukan oleh masyarakat, sehingga pendapatan dari kegiatan tersebut masuk dalam wilayah produsen. Hal ini pula yang diharapkan terjadi pada masyarakat Desa Hargorejo; HHBK seperti daun kayu putih, tanaman herbal/empon-empon, kopi, ubi kayu, dan nira dapat menjadi sektor basis yang akan banyak menyerap tenaga kerja.

Tabel 4. Kondisi Lingkungan Desa Hargorejo

Kondisi Lingkungan	< tahun 1997 (sebelum ada akses Hkm)	Tahun 1997-2013 (Ada akses Hkm)
Gersang (Panas)	23	0
Agak Hijau (Agak Sejuk)	27	17
Hijau (Sejuk)	0	33
	50	50

Sumber: Data Primer, diolah 2014

Tabel 5. Kondisi Debit Air Desa Hargorejo

Kondisi Persediaan Sumber Air	< tahun 1997 (sebelum ada akses Hkm)	Tahun 1997-2013 (Ada akses Hkm)
Sedikit	22	0
Sedang	28	12
Banyak	0	38
	50	50

Sumber: Data Primer, diolah 2014

Tabel 6. Kondisi Perekonomian Petani Desa Hargorejo

Kondisi Ekonomi Petani	< tahun 1997 (sebelum ada akses Hkm)	Tahun 1997-2013 (Ada akses Hkm)
Kurang Baik (KB)	40	26
Cukup Baik (CB)	8	19
Baik (B)	2	3
Sangat Baik (SB)	0	2
	50	50

Sumber: Data Primer, diolah 2014

Catatan : Penilaian berdasarkan penilaian responden terhadap kualitas hidupnya sendiri;

KB : sering kekurangan sampai berhutang dan makan sehari sekali atau dua kali (ubi/jagung rebus).
 CB : makan bisa tiga kali dalam sehari walau lebih sering makan ubi dan/atau jagung rebus, sering berhutang.
 B : bisa makan tiga kali sehari dengan nasi dan lauk pauk-sayuran serta bisa menyekolahkan anak, terkadang berhutang.
 SB : makan sehari tiga kali dengan lauk pauk + sayuran, serta menyekolahkan anak tanpa berhutang.

KESIMPULAN

HHBK dalam pembangunan HKm di Perbukitan Menoreh khususnya Desa Hargorejo memberikan dampak yang positif baik dari aspek ekologis, yakni terbentuk lingkungan desa yang sejuk dan debit air banyak, juga memberikan pendapatan potensial dari pemanenan HHBK yang lestari baik bagi masing-masing rumah tangga petani (ketahanan pangan) maupun Desa Hargorejo selaku wilayah produsen dengan pengaturan terhadap HHBK baik dari proses produksi, pengolahan, dan pemasaran. Untuk itu, selain perlu memperhatikan faktor legal, faktor institusional dan ekonomi level makro lainnya, juga diperlukan dukungan kebijakan agar peranan HHBK dalam pembangunan HKm dapat terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnold JE & Perez MR. 1999. *The Role of Non-Timber Forest Products in Conservation and Development. Incomes from The Forest: Methods for Development and Conservation of Forest Products for Local Communities*. CIFOR, Bogor.
- Badan Pusat Statistik Kecamatan Kokap. 2010. *Kecamatan Kokap dalam Angka*. BPS, Yogyakarta.
- Budi. 2012. *Pengetahuan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Pekarangan dan Tegalan di Perbukitan Menoreh Kabupaten Kulon Progo*. Tesis (Tidak Dipublikasikan). Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Desa Hargorejo. 2010. *Monografi Desa Hargorejo*. Yogyakarta.
- Departemen Kehutanan. 1999. *Undang-undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan*. Salinan Kepala Biro Hukum dan Organisasi. Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Jakarta.
- Departemen Kehutanan. 2007. *Peraturan Menteri Kehutanan No. 35 tahun 2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu*. Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Departemen Kehutanan. 2007. *Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta*

- Pemanfaatan Hutan Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Kementerian Kehutanan. 2013. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 9 tahun 2013 tentang Tatacara Insentif Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Kementerian Kehutanan, Jakarta.
- Purwanto AB, Triyono S, Azizah SY, & Kurniawan F. 2014. <http://arupa.or.id/sources/uploads/2014/09/Tebang-Butuh-Desa-Terong-Study-kasus.pdf>.
- Puspitojati T, Rachman E, & Ginoga K. 2013. *Hutan Tanaman Pangan Realitas, Konsep dan Pengembangan*. Balai Penelitian Teknologi Agroforestry, Ciamis.
- Sudarmalik Y, Rochmayanto, & Purnomo. 2006. Peranan Beberapa Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Riau dan Sumatera Barat. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan Riau*. 199-219.
- Yin RK. 2008. *Studi Kasus: Desain dan Metode, Edisi 1-8*. Penerjemah: Mudzakir MD PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.